



BONGKAR KERAMBA - Wali Kota Hasto Wardoyo terjun langsung dalam proses pembongkaran keramba di aliran Sungai Code, di kawasan Jogoyudan, Minggu (19/10). Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan sungai, mencegah pendangkalan, sekaligus mengantisipasi risiko banjir di musim penghujan yang sudah di depan mata.

Rp100 Juta untuk Setiap Kelurahan

■ Upaya Percepatan Penanganan Masalah Stunting

YOGYA, TRIBUN - Setiap kelurahan di Kota Yogyakarta bakal mendapat kucuran anggaran sebesar Rp100 juta, yang difokuskan untuk penanganan kasus stunting.

Alokasi tersebut, sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menegaskan kepastian alokasi itu saat silaturahmi dan sosialisasi Perda No 3/2024 di Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo, Minggu (19/10).

"Salah satu praktik dari Perda ini adalah alokasi anggaran dari provinsi untuk setiap kelurahan," kata Eko Suwanto.

"Kelurahan Muja Muju tahun ini dapat Rp100 juta, termasuk 45 kelurahan yang lain di Kota Yogya, khusus untuk percepatan penanganan masalah stunting," tandasnya.

Anggaran itu menyasar total lebih kurang 2.225 warga Kota Yogyakarta, terdiri dari balita dengan berat badan kurang atau nafsu makan rendah, serta ibu hamil berisiko seperti anemia.

Dalam kesempatan tersebut, Eko pun menegaskan komitmen partainya, PDI Perjuangan dalam memperjuangkan lahirnya keluarga sehat dan bahagia.

"Sasaran kita ibu hamil dan balita. Prinsipnya, PDI Perjuangan punya komitmen kuat

SASAR 2.225 WARGA

- Setiap kelurahan di Kota Yogya bakal mendapat kucuran anggaran sebesar Rp100 juta.
- Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk program-program penanganan kasus stunting.
- Sasarannya adalah sekitar 2.225 warga, terdiri dari balita dengan berat badan kurang atau nafsu makan rendah, serta ibu hamil berisiko seperti anemia.

untuk melahirkan keluarga bahagia, yang sehat walafiat, serta hidup dalam lingkungan yang baik," tandasnya.

Meski demikian, Eko mengakui adanya tantangan terkait validasi data sasaran antara Puskesmas dan Posyandu, seperti ditemukannya kasus balita dengan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Yogyakarta tapi tinggal sehari-hari di luar kota.

Namun secara khusus, ia mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DIY akan kembali memperjuangkan alokasi Rp100 juta per kelurahan untuk tahun-tahun mendatang.

"Tahun ini Rp100 juta, kemudian tahun depannya juga Rp100 juta. Jadi, totalnya untuk Kota Yogyakarta Rp4,5 miliar, untuk membantu mempercepat pe-

nyelesaian masalah stunting," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan alokasi anggaran ini.

Terlebih, fokus pemanfaatannya adalah untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, yang disebutnya sebagai permasalahan krusial di Kota Pelajar.

"Betul-betul kita ucapkan terima kasih kepada (pemerintah) provinsi dan juga DPRD, terkhusus Pak Eko, yang sudah memperjuangkan alokasi Rp100 juta per kelurahan itu masih terus dilanjutkan di tahun 2026," terangnya.

Wali Kota berlatarbelakang dokter kandungan tersebut memaparkan progres signifikan dalam upaya pengentasan stunting di Kota Yogyakarta.

Ia menyebutkan, dari angka stunting yang masih 14,8 persen pada akhir 2024, saat ini, per bulan September 2025, sudah turun menjadi 9,6 persen.

"Ada penurunan yang signifikan hampir 5 persen selama hampir setahun itu. Kami memantau secara detail data stunting dari hari ke hari. Saya kawal terus agar data ini betul-betul valid," ucapnya.

"Kami juga pastikan bantuan makanan tambahan sampai ke mulutnya ibu hamil, sampai ke mulutnya balita, sampai ke mulutnya calon mantan, atau mereka yang baru menikah," pungkas Hasto. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005